

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL DI SMA NEGERI 11 KOTA BANDUNG

Veronica Iovina Ayu¹, Zaldy Adrianto²

Akuntansi Sektor Publik, Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia¹

Veronica21004@mail.unpad.ac.id, Zaldy.adrianto@unpad.ac.id

Abstract

*This study aims to analyze the implementation of the digital payment system at SMAN 11 Kota Bandung in supporting efficient, transparent, and accountable financial governance. The research employed a descriptive qualitative method, utilizing in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The findings reveal that the application of digital payments through ARKAS and non-cash transactions has improved transaction efficiency, expedited financial reporting, and strengthened public accountability. Nevertheless, the implementation process faces several challenges, particularly in technological infrastructure and human resource readiness. The assistance strategy provided by the West Java Provincial Education Office plays a key role in the success of this initiative. This research contributes significantly to the understanding of digital transformation in the education sector, particularly in school financial management. **Keywords: Digital Payment System, Financial Governance, Schools, Transparency***

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem pembayaran digital di SMAN 11 Kota Bandung dalam rangka mendukung tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pembayaran digital melalui aplikasi ARKAS dan metode transaksi non-tunai telah meningkatkan efisiensi transaksi, mempercepat pelaporan keuangan, dan memperkuat akuntabilitas publik. Namun, implementasi sistem ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam aspek infrastruktur teknologi dan kesiapan sumber daya manusia. Strategi pendampingan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi sistem ini. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang transformasi digital di sektor pendidikan, khususnya dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Kata Kunci: Sistem Pembayaran Digital, Tata Kelola Keuangan, Sekolah, Transparansi

Article history

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed

under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam dua dekade terakhir telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang keuangan. Salah satu manifestasi utama dari transformasi digital di sektor keuangan adalah munculnya sistem pembayaran digital. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan secara elektronik tanpa harus menggunakan uang tunai, dengan memanfaatkan berbagai platform seperti mobile banking, dompet digital, dan QR code. Fenomena ini menjadi bagian dari revolusi keuangan digital yang juga didorong oleh meningkatnya penetrasi internet dan kepemilikan perangkat smartphone di kalangan masyarakat Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, sistem pembayaran digital di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Transformasi ini didorong oleh meningkatnya penggunaan internet, perkembangan layanan keuangan berbasis aplikasi, juga kebijakan nasional seperti Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia (DJPB Kemenkeu, 2024). Menurut penelitian Ningsih et al. (2024), pemanfaatan pembayaran digital melalui QRIS, E-Wallet (DANA, OVO, dan GoPay) serta mobile banking telah memperluas akses transaksi non-tunai, tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi juga mulai merambah bidang sosial dan pendidikan.

Menurut data terbaru yang dipaparkan oleh Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono, dalam Digital Economic Forum 2025, pertumbuhan penggunaan mobile banking dan digital banking di Indonesia diperkirakan akan mencapai 52% tahun ini. Hal ini mencerminkan pergeseran preferensi masyarakat yang semakin kuat ke arah media digital dalam aktivitas finansialnya. Bank Indonesia mencatat bahwa pada Januari 2025 Jumlah transaksi digital di seluruh platform mencapai 3,5 miliar transaksi, tumbuh 35,3%, Volume transaksi via mobile banking meningkat 29,7%, sementara transaksi via internet banking naik 19,8%, dan Transaksi BI-FAST mencapai 338,5 juta transaksi dengan nilai Rp870,9 triliun, tumbuh 41,5%. (CNBC Indonesia, 2025).

Pertumbuhan transaksi digital yang meroket di Indonesia mendorong sektor pendidikan khususnya sekolah negeri, untuk mengadopsi sistem digital dalam tata kelola keuangannya (Kemendikbudristek, 2022). Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sekolah negeri merupakan entitas sektor publik yang pengelolaan dananya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Penerapan tata kelola keuangan yang baik pada sektor pendidikan menjadi sangat penting agar transformasi digital didukung oleh transparansi, akuntabilitas, dan integritas (Hapsah J. Ibrahim, 2021)

Dari data yang tersedia pada laman resmi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan total sekolah terbanyak di Indonesia dari total 39 provinsi administratif. Sekolah menengah atas (SMA) Memiliki jumlah sekolah paling sedikit diantara tingkatan lainnya, namun tetap menjadi jumlah SMA terbanyak dari 39 Provinsi. Jumlah SMA yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat mencapai lebih dari 2000 satuan pendidikan, mencakup sekolah negeri maupun swasta. Angka ini secara signifikan melampaui provinsi-provinsi besar lainnya seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur yang masing-masing memiliki sekitar 1.600 hingga 1.700 SMA. (Data sekolah - Pauddikdasmen).

Selain dari pemilik SMA terbanyak, Gambar 1.1 juga menggambarkan peta distribusi nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2024 di seluruh provinsi. Dalam peta ini, Provinsi Jawa Barat ditandai dengan warna biru muda yang menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kategori "Tinggi" dalam kesiapan digital. Dengan nilai IMDI provinsi sebesar 50,56, yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 43,34. Jawa Barat termasuk salah satu wilayah yang memiliki kesiapan digital yang cukup baik dibandingkan dengan provinsi lainnya

di Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat di Jawa Barat relatif sudah cukup siap dalam memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan.

Untuk mendukung digitalisasi yang mendunia, Dinas Pendidikan Jawa Barat memberikan respons positif pada perkembangan pembayaran digital dengan upaya seperti mendorong sekolah-sekolah untuk menerapkan sistem pembayaran digital di berbagai keperluan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan peningkatan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan lembaga pendidikan. (Antara Jabar, 2024).

Skor IMDI 2024 juga turut menggambarkan bahwa Kota Bandung merupakan kota dengan indeks masyarakat pengguna digital tertinggi di Jawa Barat, melebihi kota-kota besar lain seperti Bekasi, Bogor, dan Cimahi. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandung memiliki ekosistem digital yang paling siap dan terdepan dalam hal infrastruktur, keterampilan, pemanfaatan, dan pekerjaan digital di tingkat provinsi. (Kementerian Komunikasi dan Digital RI, 2024).

Salah satu SMA negeri di Kota Bandung yang sudah menerapkan digitalisasi adalah SMAN 11 Kota Bandung. SMAN 11 Kota Bandung telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu sekolah berbasis digital terbaik, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Sekolah ini dipilih sebagai model percontohan karena keberhasilannya dalam mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai aspek pendidikan, mulai dari sistem pembelajaran daring, pengelolaan administrasi, hingga komunikasi terpadu antara guru, siswa, dan orang tua. (Pemkot Bandung, 2023). Pada konferensi pers tahun 2015, Ridwan kamil juga mengatakan bahwa SMAN 11 Kota Bandung merupakan sekolah yang dirancang sebagai sekolah pionier yang menerapkan digitalisasi dalam kegiatan sekolahnya. Bukan hanya dari sisi pendaftaran, sistem pengerjaan ujian, pembelajaran di sekolah, dll juga sudah dirancang untuk menggunakan laptop, tablet, dan handphone. (Dewata News, 2015)

Dengan seluruh kesiapan digital pada SMAN 11 Kota Bandung, maka penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana Pelaksanaan tata kelola keuangan SMAN 11 Kota Bandung, terlebih sekolah ini merupakan lembaga pendidikan yang telah memiliki infrastruktur teknologi yang memadai dan kultur digital yang sudah berkembang. SMAN 11 Kota Bandung sebagai sekolah digital percontohan, menjadi salah satu kandidat ideal untuk diteliti karena berbagai inovasinya yang sudah di implementasikan dalam sistem administrasi dan layanan pendidikan yang sudah berbasis digital. (Pemkot Bandung, 2023)

Walaupun infrastruktur sudah memadai, penerapan digital payment perlu dikaji lebih dalam tentang manfaatnya terhadap sistem tata kelola sekolah yang baik (Munandar, D. R., 2023). Walaupun sudah banyak penelitian yang membahas tentang tata kelola sekolah, masih sangat minim yang secara mendalam membahas tata kelola sekolah yang terfokus pada tata kelola keuangannya.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan bagian penting dari infrastruktur organisasi dalam mengelola data keuangan secara sistematis. Romney dan Steinbart (2020) menyatakan bahwa SIA bertugas untuk mengumpulkan, merekam, menyimpan, dan memproses data keuangan guna menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan manajerial maupun eksternal. Hal ini diperkuat oleh pandangan Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2018) yang menekankan bahwa akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol yang

memungkinkan organisasi menunjukkan kinerja yang bertanggung jawab kepada para stakeholder.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggabungan teknologi digital dengan SIA memberikan dampak positif terhadap keakuratan dan transparansi pelaporan. Hung et al. (2023) dan Schiavi et al. (2023) mencatat bahwa integrasi sistem informasi akuntansi dengan layanan pembayaran digital, seperti transfer elektronik dan mobile banking, mampu meningkatkan akurasi data keuangan, mengurangi potensi kesalahan manual, serta mempercepat proses audit dan pelaporan. Hal ini memperkuat argumen bahwa penerapan pembayaran digital di sekolah dapat mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Temuan ini sejalan dengan penelitian Setyowati et al. (2022), yang menyebutkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berbasis digital tidak hanya meningkatkan kecepatan pelaporan keuangan, tetapi juga memperkuat transparansi, terutama dalam organisasi non-profit yang berorientasi pada layanan.

2.1.1 Mobile Banking

Mobile banking adalah layanan perbankan digital berbasis aplikasi yang disediakan oleh bank, pengguna mobile banking dapat melakukan transaksi seperti transfer, pembayaran tagihan, dan cek saldo melalui smartphone nya masing masing. Layanan ini memiliki fitur keamanan berlapis (OTP, PIN, biometrik) dan bersifat real-time. (Bank Indonesia,2023)

2.1.2 QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)

Menurut Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi QRIS, QRIS adalah standar QR Code nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), yang menyatukan berbagai kode pembayaran digital menjadi satu standar. QRIS memungkinkan pembayaran dari berbagai aplikasi e-wallet atau mobile banking cukup dengan memindai satu kode. Menurut Bank Indonesia, QRIS bertujuan untuk menciptakan efisiensi sistem pembayaran, mendorong seluruh transaksi untuk go digital, serta meningkatkan transparansi transaksi. QRIS juga membantu pencatatan akuntansi secara otomatis dan mencegah potensi transaksi tunai tidak tercatat.

2.1.3 E-Wallet (Dompot Digital)

Menurut Bank Indonesia (2023), e-wallet merupakan bagian dari instrumen uang elektronik yang diawasi dan diatur secara resmi, dan menjadi salah satu pendorong utama peningkatan transaksi non-tunai. E-wallet ini juga bisa membuat transaksi menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah dilacak.

Putri & Widodo (2022) menjelaskan bahwa setiap transaksi melalui e-wallet akan tercatat otomatis dalam sistem server penyedia layanan, termasuk tanggal, nominal, dan penerima pembayaran. Riwat transaksi ini bisa diakses oleh pengguna, yang memberikan aspek transparansi dan akuntabilitas secara real-time. Hal ini sangat bermanfaat jika digunakan dalam sistem keuangan sekolah karena mencegah praktik pencatatan manual yang rawan kesalahan. Dalam konteks tata kelola keuangan, penggunaan e-wallet mendukung:

- Efisiensi waktu dan tenaga, karena pembayaran bisa dilakukan tanpa harus datang ke sekolah atau ke bank.

- Akuntabilitas, karena setiap transaksi memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Transparansi, sebab semua pembayaran terdata secara sistematis dan dapat dikonfirmasi kapan saja.
- Partisipasi digital, karena orang tua dan siswa terbiasa menggunakan teknologi dalam pengelolaan keuangan sekolah.

2.1.4 Virtual Account

Virtual account adalah nomor rekening virtual yang dibuat khusus oleh lembaga atau penyedia layanan untuk memfasilitasi pembayaran yang langsung teridentifikasi oleh sistem. Virtual account biasa digunakan untuk pembayaran pendidikan, tagihan rutin, atau belanja daring. Dalam konteks keuangan sekolah, virtual account menjadi alat pembayaran yang efisien dan aman, karena setiap siswa/orang tua memiliki kode unik masing-masing. Hal ini memperkuat aspek akuntabilitas dan keakuratan pencatatan, karena uang masuk langsung tercatat atas nama pengirim yang spesifik. (Hariyono et al., 2025)

2.1.5 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) merupakan salah satu teori perilaku yang paling banyak digunakan untuk memahami niat dan perilaku individu dalam mengadopsi suatu teknologi. Teori ini menjelaskan bahwa intensi untuk melakukan suatu tindakan ditentukan oleh tiga komponen utama:

1. Sikap terhadap perilaku (Attitude toward the behavior): yaitu penilaian individu terhadap manfaat atau kerugian dari suatu tindakan tertentu.
2. Norma subjektif (Subjective norm): yaitu persepsi individu terhadap ekspektasi sosial dari pihak-pihak penting di sekitarnya.
3. Kontrol perilaku yang dirasakan (Perceived behavioral control): yaitu persepsi individu mengenai kemampuannya dalam mengendalikan atau melaksanakan suatu tindakan.

Penelitian oleh Gainau dan Atarwaman (2023) menunjukkan bahwa dukungan sosial dan rasa percaya diri sangat berpengaruh terhadap keinginan pelajar dan orang tua untuk menggunakan QRIS di sekolah. Selain itu, penelitian Jusoh & Jing (2019) di Universiti Putra Malaysia juga membuktikan bahwa norma sosial dan rasa mampu menggunakan teknologi, sangat memengaruhi keputusan mahasiswa untuk menggunakan e-payment. Artinya, persepsi orang lain dan keyakinan diri sendiri sangat penting dalam mendorong penggunaan pembayaran digital.

2.1.6 Tata Kelola Keuangan Sekolah

Tata kelola keuangan sekolah diatur oleh Undang-undang, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dana pendidikan, yang menekankan

bahwa pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik :

- A. Efisiensi :** Efisiensi dalam tata kelola keuangan sekolah berarti pemanfaatan sumber daya (dana, waktu, tenaga, dan teknologi) secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan tanpa pemborosan.
- B. Transparansi :** Transparansi yang dimaksud adalah memastikan bahwa seluruh stakeholders memiliki akses yang cukup terhadap informasi keuangan dan kebijakan yang berlaku
- C. Akuntabilitas Publik:** Memiliki arti bahwa seluruh penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat.

Ibrahim (2021) menyatakan bahwa penerapan sistem pembayaran digital yang didukung oleh tata kelola keuangan yang baik dapat mengurangi risiko penyimpangan dana dan meningkatkan kepercayaan publik. Sekolah yang mampu menerapkan tata kelola keuangan yang baik akan lebih siap dalam menghadapi audit dan evaluasi berkala dari pemerintah atau pihak eksternal. Dengan demikian, penerapan tata kelola sekolah yang baik dalam aspek keuangan tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan dana, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan sekolah yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat.

3. Metodologi Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang data akhirnya berupa kata-kata, narasi, atau dokumen, bukan dalam bentuk angka atau statistik kuantitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2017), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan, serta perilaku yang diamati dari subjek penelitian.

Penelitian deskriptif sendiri bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena tertentu yang sedang berlangsung. Penelitian kualitatif deskriptif dalam pembahasan ini digunakan untuk menggali dan mendeskripsikan pelaksanaan sistem pembayaran digital di SMAN 11 Kota Bandung, bagaimana penerapannya dalam mendukung tata kelola keuangan sekolah yang sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi baik dari sisi teknis maupun sosial.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini tidak dilakukan di Peneliti akan melakukan penelitian di SMAN 11 Kota Bandung.

3.3 Sumber Data

Menurut Lofland sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam Metodologi Penelitian Kualitatif, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan data tambahan dapat berupa dokumen, foto, atau data statistik. Dalam penelitian kualitatif, sumber data diartikan sebagai subjek atau objek dari mana data diperoleh.

Jika data dikumpulkan melalui wawancara, maka sumber data disebut informan, yaitu individu yang memberikan jawaban atau informasi baik secara lisan maupun tertulis. Apabila menggunakan observasi, maka sumber datanya dapat berupa perilaku, aktivitas, atau proses yang terjadi. Sedangkan pada teknik dokumentasi, sumber data utamanya adalah dokumen, arsip, atau catatan resmi. Dalam penelitian ini, sumber data primer berupa kata-kata yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan sebagai berikut :

1. Kepala Sekolah dan Staff (Pengurus sekolah yang berkaitan dengan keuangan)
2. Guru
3. Dinas Pendidikan Kota Bandung

Wawancara ini akan menggali berbagai informasi mengenai penerapan sistem pembayaran digital dan bagaimana sistem tersebut mendukung tata kelola keuangan sekolah yang sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen resmi sekolah, seperti Laporan Keuangan, kebijakan atau SOP terkait pembayaran digital, dokumen KPI (Key Performance Indicator) pada bendahara, profil SMAN 11 Kota Bandung, serta dokumen pendukung lain yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum SMAN 11 kota Bandung

SMAN 11 Kota Bandung adalah sekolah menengah atas negeri yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sekolah ini berlokasi di wilayah Arcamanik, Kota Bandung, dan melayani peserta didik dari berbagai latar belakang.

Dalam pengelolaan kelembagaannya, SMAN 11 dikenal sebagai sekolah yang aktif mengikuti kebijakan pendidikan terbaru, khususnya dalam hal digitalisasi tata kelola keuangan. Sejak tahun 2021, sekolah ini telah menerapkan sistem pembayaran digital melalui penggunaan aplikasi ARKAS dan metode transaksi non-tunai untuk mendukung pengelolaan dana BOS. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap kebijakan pemerintah serta komitmen sekolah dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Selain itu, sekolah juga melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan memperkuat infrastruktur digital sebagai bagian dari upaya mendukung sistem pembayaran berbasis elektronik. Pengalaman SMAN 11 dalam menjalankan sistem ini menjadi menarik untuk diteliti, karena dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktik digitalisasi keuangan di lingkungan sekolah menengah atas.

4.1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi di SMAN 11 Kota Bandung dirancang untuk mencerminkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara sistematis dalam mendukung kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan sekolah. Struktur ini mengacu pada prinsip manajemen pendidikan modern yang menekankan keterbukaan, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan sumber daya manusia.

Pada posisi tertinggi terdapat Kepala Sekolah, yakni Drs. H. Suparman, M.M.Pd., yang memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh kebijakan, kegiatan, dan pengelolaan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai pengambil keputusan utama, koordinator strategis, serta pengawas pelaksanaan program kerja seluruh unit di bawahnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala sekolah dibantu oleh empat orang Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) yang membidangi:

- Kurikulum, dijabat oleh M. Hatta, S.Pd. Membawahi Bidang :
 - o Pembelajaran: Rika Fitria, S.Pd.
 - o Pengolahan Nilai dan Data: Imas Srie R., S.Pd.
 - o Evaluasi: Taufik Hadian, S.Pd., Gr.
- Kesiswaan, dijabat oleh Syam Ahmad, S.Pd. Membawahi Bidang :
 - o Bela Negara dan Ketertiban Peserta Didik: Anggie Anggraini TS, S.Pd., Gr. dan Chandrawan Satria, S.Pd., Gr.
 - o Ekstrakurikuler: Kristalistiano, M.Pd., Gr.
 - o Keorganisasian dan OSIS: Ita Tahyudin, S.Pd.
- Sarana dan Prasarana (Sarpras), dijabat oleh Nuke Sandra Mauline, S.Pd., Gr. Membawahi Bidang :
 - o Pembelajaran: Wisma Gelar K., M.Pd.
 - o Lingkungan Sekolah: Dewi Endah M., S.S.
 - o Sistem Informasi dan Manajemen: Liana Adilah Fahmuddinia, S.Pd.
- Hubungan Masyarakat (Humas), dijabat oleh Rofiqoh Nurwahidah, M.Pd., Gr. Membawahi Bidang :
 - o Pemberdayaan Alumni: Anggi Rizkiyani, M.Pd.
 - o Pengadministrasian Umum: (juga oleh Anggi Rizkiyani, M.Pd.)

Tenaga administrasi keuangan di sekolah termasuk bendahara atau staff tata usaha yang mengelola keuangan secara struktural berada di bawah naungan Kepala Sekolah.

4.2 Pelaksanaan Sistem Pembayaran Digital di SMAN 11 Kota Bandung

4.2.1 Jenis Transaksi digital di SMAN 11 Kota Bandung

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pihak keuangan sekolah, perwakilan Dinas Pendidikan, serta beberapa guru, diketahui bahwa jenis transaksi yang paling familiar dan dominan dilakukan melalui sistem pembayaran digital di SMAN 11 Kota Bandung adalah penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pembayaran honor atau gaji tenaga pendidik serta

kependidikan. Kedua jenis transaksi ini menjadi fokus utama digitalisasi karena melibatkan alur keuangan rutin, nominal yang relatif besar, dan kebutuhan akan pencatatan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi sistem digital pada transaksi-transaksi ini dinilai sangat membantu dalam mempercepat proses pencairan, meningkatkan transparansi, serta meminimalisasi risiko kesalahan administratif dan penyalahgunaan dana

4.2.2 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berkualitas, pemerintah melalui Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 menetapkan ketentuan teknis mengenai pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS merupakan bentuk dukungan biaya operasional non-personalia yang diberikan kepada satuan pendidikan, termasuk sekolah menengah atas, agar dapat menjalankan fungsi pendidikannya secara optimal.

Tujuan utama dari dana BOS adalah untuk membiayai kebutuhan dasar operasional sekolah, baik dalam bentuk barang maupun jasa, yang tidak terkait langsung dengan pembayaran gaji pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, ruang lingkup penggunaan dana ini sangat luas dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah, dengan tetap mengacu pada aturan nasional. Dalam praktiknya, dana BOS dapat digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain:

- Pembayaran honorarium bagi guru non-ASN dan tenaga kependidikan lainnya,
- Pengadaan alat tulis kantor (ATK), media pembelajaran, dan buku ajar,
- Perawatan dan pemeliharaan sarana serta prasarana sekolah,
- Pendanaan kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler,
- Langganan internet, platform pembelajaran, dan sistem informasi digital sekolah.

Penyaluran dana BOS dilakukan secara langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah, melalui bank penyalur yang telah ditentukan. Oleh karena itu, setiap sekolah wajib memiliki rekening aktif atas nama sekolah yang dikhususkan untuk menampung dana BOS. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat proses penyaluran serta meminimalisasi potensi kebocoran dan penyalahgunaan dana.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, sekolah diwajibkan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) secara digital melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS)

4.2.3 Prosedur dan Alur Transaksi

Penerapan sistem pembayaran digital di SMAN 11 Kota Bandung dilakukan dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh sekolah dan mengacu pada pedoman pengelolaan dana BOS dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Prosedur ini mencakup seluruh tahapan mulai dari

perencanaan anggaran, pelaksanaan transaksi, hingga pelaporan yang dilakukan melalui aplikasi ARKAS.

ARKAS merupakan singkatan dari Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, yaitu sistem digital resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk membantu satuan pendidikan dalam menyusun, mengelola, dan melaporkan penggunaan dana BOS secara transparan dan akuntabel. Melalui ARKAS, sekolah dapat menginput perencanaan anggaran tahunan, merekam transaksi keuangan secara digital, dan mengunggah bukti pengeluaran. Seluruh laporan keuangan sekolah dapat diakses oleh pemerintah pusat secara real-time. Penerapan ARKAS menjadi bagian dari kebijakan nasional digitalisasi tata kelola keuangan sekolah. Sebelum digitalisasi, proses keuangan seperti pembayaran honor, pembelian barang, dan pelaporan dana BOS dilakukan secara manual, dengan alur kerja yang cukup panjang dan rentan terhadap keterlambatan serta kesalahan administrasi. Setelah penerapan sistem digital, khususnya melalui penggunaan aplikasi ARKAS, transaksi dilakukan secara elektronik dan terhubung langsung dengan sistem BOS Salur milik pemerintah pusat. Langkah-langkah dalam alur transaksi digital di SMAN 11 dapat diringkas sebagai berikut:

1. Perencanaan : SMAN 11 Kota Bandung menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) lewat aplikasi ARKAS.
2. Pengajuan & Verifikasi : RKAS dikirim ke Dinas Pendidikan untuk diverifikasi dan disetujui. Kalau disetujui, dana BOS akan dicairkan ke rekening sekolah.
3. Pelaksanaan Kegiatan & Transaksi : Sekolah melakukan kegiatan sesuai RKAS. Semua pengeluaran dilakukan via transfer (non-tunai) dan dicatat di ARKAS.
4. Unggah Bukti Transaksi : Semua bukti belanja, seperti invoice, nota, dan kuitansi, diunggah ke sistem.
5. Pelaporan Otomatis : Laporan realisasi keuangan bisa langsung di-generate dari ARKAS. Ini dikirim ke Dinas dan juga bisa ditunjukkan ke publik, seperti saat rapat komite.
6. Monitoring & Audit : Dinas Pendidikan atau Inspektorat dapat memeriksa laporan secara real-time karena semua data sudah terekam digital.

Hasil wawancara dengan Staff Administrasi Keuangan SMAN 11 Kota Bandung mendapati bahwa sistem ini mempercepat proses transaksi dan meminimalkan kesalahan input data. Selain itu, bukti digital yang terekam dalam sistem juga mempermudah proses verifikasi saat dilakukan audit oleh pihak eksternal

4.2.4 Tingkat Kemudahan dan Kecepatan

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, Sistem pembayaran digital dinilai cukup mudah digunakan oleh staff administrasi dan pihak manajemen sekolah, meskipun pada tahap awal pelaksanaannya memerlukan

adaptasi. Hasil wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, dan guru menunjukkan bahwa aplikasi ARKAS memiliki interface yang sederhana, dan langkah-langkahnya mudah dipahami oleh staf, terutama setelah mendapatkan pelatihan dari Dinas Pendidikan.

Kecepatan dalam proses pembayaran juga meningkat secara signifikan. Sebelum digitalisasi, pembayaran kepada pihak ketiga bisa memakan waktu beberapa hari karena harus melalui proses pengambilan uang tunai dan verifikasi manual. Namun kini, setelah sistem digital diterapkan proses pencairan dana menjadi lebih cepat karena langsung ditransfer ke rekening tujuan, pengeluaran dana tidak perlu lagi dilakukan secara tunai, sehingga memperkecil risiko kehilangan atau keterlambatan, monitoring transaksi bisa dilakukan secara real-time melalui dashboard ARKAS.

Sebagian besar informan menyatakan bahwa sistem ini sangat membantu mereka dalam menjalankan tugas administratif. Bahkan dari sisi guru yang menerima honor juga menyatakan bahwa mereka menerima pembayaran lebih cepat dan jelas, karena bukti transaksi bisa dilihat langsung.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan terkait kecepatan sistem, terutama ketika terjadi gangguan jaringan internet atau ketika sistem ARKAS mengalami pemeliharaan. Namun secara umum, kemudahan dan kecepatan sistem pembayaran digital telah membawa dampak positif bagi efisiensi kerja sekolah

4.2.5 Tingkat Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Publik

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, mulai dari staff administrasi keuangan hingga guru, terlihat adanya perubahan nyata dalam cara sekolah mengelola keuangan setelah penerapan sistem pembayaran digital. Perubahan ini tidak bersifat sekadar teknis, melainkan menyentuh hal-hal mendasar dalam budaya tata kelola yang selama ini dijalankan di lingkungan sekolah.

Hasil temuan menunjukkan bahwa efisiensi merupakan dampak langsung yang paling terasa oleh pihak sekolah sejak transisi ke sistem digital dilakukan. Proses yang sebelumnya banyak memakan waktu, terutama dalam pengajuan dan pencairan anggaran, kini dapat diselesaikan lebih cepat melalui platform ARKAS dan BOS Salur. Staff Administrasi Keuangan menjelaskan bahwa sistem ini sudah menyederhanakan alur kerja divisi keuangan karena pengajuan dan verifikasi kegiatan bisa dilakukan secara daring, tanpa harus melalui proses birokratis berlapis seperti sebelumnya.

Guru juga menyampaikan pengalaman serupa. Ia menjelaskan bahwa pembayaran honor kini lebih tepat waktu dan tidak lagi bergantung pada kesiapan manual dari petugas keuangan. Ini menandai perubahan besar dalam pengelolaan keuangan, di mana pembayaran dilakukan secara otomatis ke rekening masing-masing penerima setelah semua administrasi digital diselesaikan. Efisiensi ini tidak hanya berdampak pada kecepatan, tetapi juga pada kestabilan alur kerja administratif sekolah secara keseluruhan. Tenaga administrasi menyebut bahwa mereka dapat lebih fokus pada validasi data dan pencatatan digital karena tidak lagi disibukkan dengan pengarsipan fisik dan pengurusan bukti cetak (Perlu di persiapkan hanya jika ada yang meminta).

Aspek transparansi juga menjadi dimensi penting yang dibahas dalam hasil penelitian ini. Dengan penerapan sistem pembayaran digital, informasi keuangan sekolah secara umum menjadi lebih terdokumentasi, tertata, dan mudah ditelusuri oleh pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan, seperti kepala sekolah dan bendahara. Sistem digital seperti ARKAS membantu mencatat transaksi keuangan dengan jejak digital yang jelas, sehingga memudahkan proses verifikasi dan pelaporan.

Setiap transaksi dapat dilacak berdasarkan akun pengguna dan waktu input, yang membuat akuntabilitas semakin tinggi. Selain itu, pembagian peran dalam pengelolaan anggaran menjadi lebih terstruktur, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan dana dan memperkuat sistem pengawasan internal sekolah.

Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik transparansi belum dirasakan secara merata hingga ke seluruh guru, khususnya dalam hal penerimaan gaji. Meskipun proses pembayaran gaji dilakukan secara digital melalui transfer langsung ke rekening masing-masing guru, slip gaji yang diberikan masih bersifat manual. Slip manual tersebut pun sering kali tidak mencantumkan rincian potongan secara jelas, sehingga menimbulkan kebingungan.

Salah satu guru mengungkapkan bahwa pernah mengalami potongan gaji dalam jumlah tertentu (misalnya sekitar Rp300.000) tanpa ada penjelasan yang menyertai. Potongan tersebut berbeda-beda antara satu guru dan lainnya, namun tidak ada informasi resmi atau penjelasan tertulis terkait asal-usul potongan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem transfer gaji sudah digital, aspek transparansi dalam pemberian informasi kepada guru masih lemah. Selain itu, sosialisasi mengenai sistem pembayaran dan struktur gaji belum dilakukan secara merata. Informasi umumnya hanya diketahui oleh kepala sekolah dan bendahara, tanpa disampaikan secara menyeluruh kepada para guru. Akibatnya, guru tidak mengetahui secara pasti komponen yang membentuk gaji maupun potongan yang dikenakan.

Budaya transparansi memang mulai tumbuh seiring digitalisasi sistem pembayaran, namun belum sepenuhnya menyentuh aspek komunikasi dan akses informasi bagi seluruh penerima gaji. Oleh karena itu, harapannya ke depan sistem ini bisa lebih ditingkatkan, tidak hanya dari sisi teknis transfer dana, tetapi juga dalam penyediaan slip gaji digital yang lengkap dan mudah diakses, serta adanya sosialisasi yang melibatkan seluruh guru agar setiap pihak memahami hak dan kewajiban finansialnya secara utuh.

Hasil pembahasan juga menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana BOS semakin terjaga setelah diterapkannya sistem digital. Hal ini terlihat dari kemudahan sekolah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban serta kesiapan dalam menghadapi audit dari Dinas Pendidikan atau pihak inspektorat. Staff administrasi keuangan menyampaikan bahwa seluruh bukti transaksi kini telah terdigitalisasi, sehingga tidak perlu lagi melakukan pencarian arsip manual saat diperlukan.

Setiap dana yang keluar dari rekening BOS sekolah harus melalui prosedur digital dan disesuaikan dengan rencana anggaran kegiatan yang telah disahkan melalui ARKAS. Sistem ini menutup celah kemungkinan penyalahgunaan dana karena setiap transaksi hanya dapat dilakukan berdasarkan RKAS yang telah diverifikasi. Dengan demikian, sekolah memiliki dasar administratif dan legal yang kuat untuk mempertanggungjawabkan seluruh belanja yang dilakukan.

4.3 Tantangan dalam implementasi sistem pembayaran digital

Implementasi sistem pembayaran digital dalam lingkungan pendidikan, khususnya di SMAN 11 Kota Bandung, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Meskipun memiliki banyak keunggulan, pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi, baik dari sisi infrastruktur, teknis, hingga sumber daya manusia

4.3.1 Tantangan Teknis dan Infrastruktur

Dalam proses penerapan sistem pembayaran digital di sekolah, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kesenjangan infrastruktur teknologi antar sekolah. Tidak semua satuan pendidikan memiliki akses internet yang memadai atau perangkat pendukung yang layak. Hal ini sangat dirasakan oleh sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran atau daerah dengan koneksi internet yang lemah.

Pihak Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa “nggak semua sekolah punya perangkat atau jaringan internet yang stabil. Apalagi sekolah-sekolah yang ada di pinggiran kota atau daerah rawan sinyal. Akhirnya proses input data ke sistem kayak ARKAS bisa terhambat.” Selain itu, penggunaan perangkat keras yang sudah usang menyebabkan aplikasi pelaporan berjalan lambat (lag), yang turut menurunkan efisiensi kerja bendahara sekolah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) guna memperluas jaringan internet ke sekolah-sekolah yang belum terjangkau. Sekolah juga diarahkan untuk mengajukan bantuan perangkat teknologi melalui dana BOS atau dukungan dari Corporate Social Responsibility (CSR).

4.3.2 Tantangan Sumber Daya Manusia

Kendala berikutnya yang cukup krusial adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, khususnya guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi keuangan. Digitalisasi sistem menuntut keterampilan baru dalam pengoperasian aplikasi, pelaporan transaksi, hingga penyesuaian terhadap prosedur baru yang berbasis sistem.

Dalam wawancara, perwakilan Dinas menyebutkan bahwa, “masih banyak staff atau bendahara yang belum terbiasa pakai sistem digital. Ada yang gaptek, ada juga yang takut salah input. Jadi kadang mereka lebih nyaman pakai cara manual, padahal itu udah nggak boleh lagi.”

Situasi ini menunjukkan adanya penolakan terhadap perubahan, terutama bagi individu yang belum memiliki kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi. Menanggapi hal ini, Dinas menyelenggarakan pelatihan secara rutin dan pendampingan teknis secara langsung, bahkan dalam beberapa kasus dilakukan secara privat dengan mendatangi sekolah yang masih mengalami kesulitan. Selain itu, pendekatan komunitas juga diterapkan, di mana kepala sekolah yang sudah menguasai sistem diminta menjadi mentor bagi sekolah lain.

4.3.3 Strategi Penanganan dari Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah merancang berbagai strategi untuk merespons tantangan-tantangan tersebut. Di antaranya adalah pelatihan teknis yang berfokus pada penggunaan aplikasi seperti ARKAS, SIPLah, serta platform e-payment lainnya. Pelatihan ini dirancang agar tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga langsung dipraktikkan oleh peserta.

Selain itu, Dinas juga membentuk tim pendamping BOS tingkat kota yang bertugas memberikan bimbingan langsung kepada sekolah. Dalam keterangannya, Dinas menyampaikan bahwa “kita punya tim pendamping BOS tingkat kota. Mereka ini biasanya turun langsung ke sekolah-sekolah, terutama yang masih baru belajar sistem digital.”

Dinas juga menjalin kerja sama dengan Bank BJB untuk memfasilitasi pembukaan rekening BOS serta memperkenalkan transaksi non-tunai dan penggunaan QRIS. Kerja sama ini membantu sekolah agar tidak perlu mencari solusi sendiri, karena telah difasilitasi oleh pemerintah daerah

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi sistem pembayaran digital di SMAN 11 Kota Bandung, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem Pembayaran Digital di SMAN 11 Kota Bandung

SMAN 11 Kota Bandung telah secara aktif menerapkan sistem pembayaran digital sejak tahun 2021, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sekolah menggunakan aplikasi ARKAS dan sistem transaksi non-tunai dalam pengelolaan dana BOS, pembayaran honorarium, serta pengadaan barang dan jasa. Proses ini mendukung upaya peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan sekolah.

2. Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas

Penerapan sistem pembayaran digital di SMAN 11 Kota Bandung berdampak positif terhadap efisiensi dan akuntabilitas keuangan sekolah. Transaksi menjadi lebih cepat, tertib, dan terdokumentasi melalui platform seperti ARKAS, yang memungkinkan pelacakan real-time dan unggahan bukti transaksi secara digital. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di tingkat manajemen. Namun, di tingkat pelaksana seperti guru, transparansi belum merata. Guru tidak rutin menerima slip gaji, dan jika pun diberikan, rincian potongan sering tidak jelas. Sosialisasi sistem ini pun terbatas pada kepala

sekolah dan bendahara, belum menjangkau guru sebagai penerima manfaat langsung.

3. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun penerapan sistem pembayaran digital di SMAN 11 Kota Bandung membawa manfaat signifikan dalam hal efisiensi dan transparansi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur, seperti jaringan internet yang belum stabil, serta rendahnya keterampilan teknis di kalangan staf administrasi. Selain itu, resistensi dari pihak-pihak yang belum terbiasa dengan sistem digital, terutama karena faktor usia dan kebiasaan kerja lama, turut menghambat proses adaptasi. Kurangnya sosialisasi menyeluruh juga menyebabkan guru sebagai penerima manfaat langsung belum sepenuhnya memahami sistem yang diterapkan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan implementasi yang optimal dan merata, diperlukan upaya komprehensif melalui pelatihan rutin, perbaikan infrastruktur, peningkatan akses informasi, serta pendekatan inklusif yang melibatkan seluruh elemen sekolah

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Sekolah

Diharapkan sekolah dapat terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan, tidak hanya terkait aspek teknis penggunaan sistem digital keuangan seperti ARKAS dan SIPLah, tetapi juga terkait manajemen informasi dan pelaporan. Selain itu, sekolah perlu memperkuat komunikasi internal, khususnya dalam menyampaikan informasi keuangan kepada seluruh guru secara transparan dan konsisten, misalnya melalui penyediaan slip gaji digital yang rinci dan mudah diakses.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

kisaran agar penelitian mendatang memperluas fokus studi ke beberapa sekolah dengan karakteristik yang berbeda, baik dari segi geografis (perkotaan dan pedesaan), status sekolah (negeri dan swasta), maupun kesiapan digital. Penelitian juga dapat menggabungkan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat efisiensi, transparansi, kepuasan pengguna, serta pengaruhnya terhadap kualitas tata kelola keuangan sekolah. Topik seperti penerimaan pengguna terhadap sistem digital dan kendala komunikasi informasi juga layak untuk dieksplorasi lebih dalam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ansori, M. A. Z., & Wahyudin, M. W. (2024). Literasi keuangan fintech untuk UMKM dan pendidikan. *MES Research Journal*, 1(2), 1-12. <https://www.mes-bogor.com/journal/index.php/mrj/article/view/130>
- [2] Antara Jabar. (2024, Maret 21). Disdik Jabar sosialisasikan sistem pembayaran nontunai di sekolah. *Antara News Jawa Barat*. <https://jabar.antaranews.com/rilis-pers/3938979/disdik-jabar-sosialisasikan-sistem-pembayaran-nontunai-di-sekolah>
- [3] Arief, T. M. V. (2024, February 28). Jawa Barat jadi daerah dengan transaksi “cashless” paling banyak di Indonesia. *KOMPAS.com*. <https://bandung.kompas.com/read/2024/02/28/111158378/jawa-barat-jadi-daerah-dengan-transaksi-cashless-paling-banyak-di-indonesia>
- [4] Arjun, A. (2024). My Al-Badar sebagai sistem pembayaran pesantren [Skripsi, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8742/>
- [5] Aulia, R. (2024). Implementasi QRIS BSI Mobile sebagai alat pembayaran non tunai [Skripsi, UIN KHAS Jember]. <http://digilib.uinkhas.ac.id/33125/1/SKRIPSI%20ROBIATUL%20AULIA.pdf>
- [6] Cahyani, F. A. E. (2023). Evaluasi penggunaan PSP Mobile di pesantren [Skripsi, UIN Saizu]. <https://repository.uinsaizu.ac.id/25117>
- [7] Fadli, F. R. (2023). Faktor penggunaan QRIS di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpak*. <https://repository-feb.unpak.ac.id/xmlui/handle/123456789/7648>
- [8] Gumelar, T. M., & Shauki, E. R. (2020). Pencegahan fraud pada pengelolaan dana organisasi: Perspektif Theory of Planned Behavior. *JURNAL ASET*, 12(1), 50-61. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). Laporan digitalisasi sekolah. <https://www.kemdikbud.go.id>
- [9] Lubuk, S. M. K. (2024, July 24). Semangat transformasi pada proses digitalisasi pembayaran pemerintah. *DJPb Kemenkeu*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3224-semangat-transformasi-pada-proses-digitalisasi-pembayaran-pemerintah.html>
- [10] Muflih, M., Purbayati, R., & Setyowati, D. H. (2021). Niat adopsi akuntansi infaq elektronik: Investigasi peran Theory of Planned Behavior. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 3, 27-34.
- [11] Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Laporan literasi dan inklusi keuangan nasional. <https://www.ojk.go.id> (2025).
- [12] Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 3(1), 245-252. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i1.3496>
- [13] Prihatini, F. (2022). Pengaruh pengetahuan akuntansi, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku terhadap minat mengimplementasikan akuntansi digital [Skripsi, UIN Walisongo].
- [14] Yessie, A., Avianti, I., & Sofia, P. (2023). Determinants of client acceptance decisions and the impact on the reputation of public accounting firms in Indonesia. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 17(2), 147-150.
- [15] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- [16] Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.)*. Thousand Oaks: SAGE Publications.

